

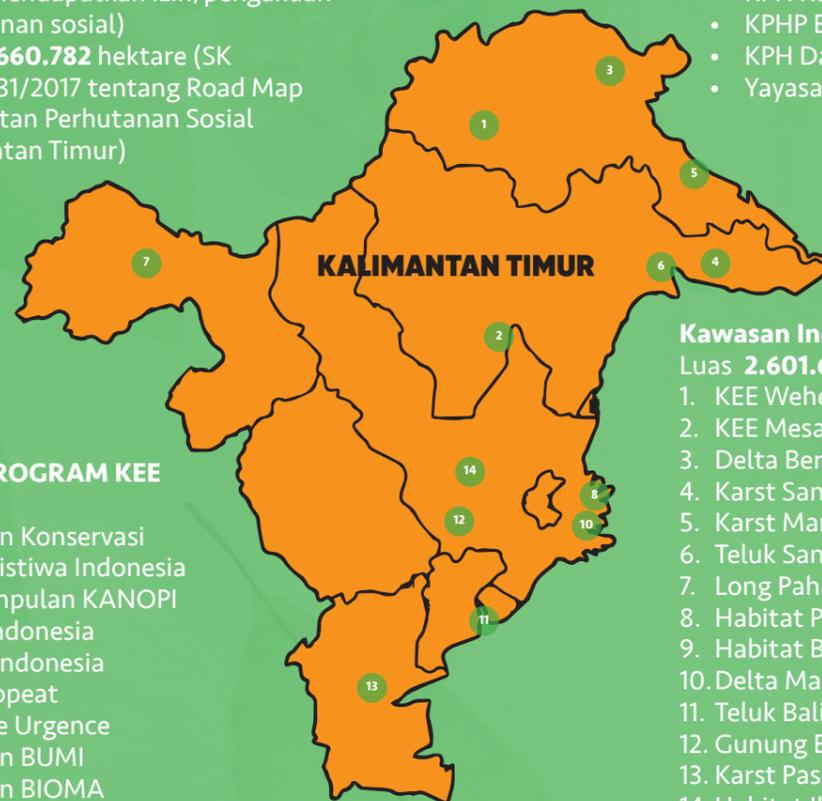


PERHUTANAN SOSIAL (PS) DI KALIMANTAN TIMUR

2021 **195.471,75** hektare (82 unit sudah mendapatkan izin/pengakuan perhutanan sosial)
Target: **660.782** hektare (SK 522/K.431/2017 tentang Road Map Percepatan Perhutanan Sosial Kalimantan Timur)

PENDAMPING PERHUTANAN SOSIAL

- YKAN
- KPH Berau Barat
- KPH Kelinjau
- KPHP Bengalon
- KPH Damai
- Yayasan Kawal Borneo



Kawasan Indikatif KEE*

Luas **2.601.659** hektare

1. KEE Wehea Kelay;
2. KEE Mesangat Suwi;
3. Delta Berau;
4. Karst Sangkulirang Mangkalihat Hulu;
5. Karst Mangkalihat Pesisir;
6. Teluk Sangkulirang;
7. Long Pahangai;
8. Habitat Pesut Mahakam;
9. Habitat Badak Sumatera;
10. Delta Mahakam;
11. Teluk Balikpapan;
12. Gunung Beratus;
13. Karst Paser dan Taman KEHATI;
14. Habitat Ibis Karau.

*SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522.5/K.672/2020

MITRA PROGRAM KEE

- YKAN
- Yayasan Konservasi Khatulistiwa Indonesia
- Perkumpulan KANOPI
- RASI Indonesia
- WWF Indonesia
- GIZ Propeat
- Planete Urgence
- Yayasan BUMI
- Yayasan BIOMA
- Forum Peduli Teluk Balikpapan Pesisir

STRATEGI PENGELOLAAN PERKEBUNAN SAWIT BERKELANJUTAN

DEMI HAYATI YANG LESTARI

Penerapan prosedur mitigasi dan kompensasi ditujukan untuk mendorong pelestarian keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, serta nilai-nilai sosial dan budaya. Program ini juga dapat melindungi kawasan-kawasan yang penting untuk dipelihara saat budidaya kelapa sawit diperluas. YKAN mengusulkan hal ini dilakukan dengan mendorong kepatuhan anggota terhadap standar sesuai dengan diatur dalam Prinsip dan Kriteria. Hal ini juga menjadi kunci penting dalam program kegiatan yang dijalankan YKAN.

YKAN bersama mitra-mitra yang lain terus mendukung implementasi prinsip mitigasi dan kompensasi untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Kendati demikian, masih ada sejumlah perusahaan yang belum melaksanakan aturan, misalnya membuka lahan baru tanpa didahului kajian NKT.

Beberapa kata kunci dalam kepatuhan penerapan prosedur mitigasi dan kompensasi adalah pengungkapan (*disclosure*), penilaian kewajiban, pengembangan dan persetujuan atas rencana remediasi dan kompensasi, serta

pelaksanaan dan pemantauan konsisten di lapangan. Agar penerapan prosedur itu berjalan komprehensif, dibutuhkan kesepahaman antar seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, perusahaan perkebunan kelapa sawit, masyarakat, dan organisasi sipil. Kesepahaman tersebut bisa dibangun lewat proses sosialisasi masif mengenai prosedur mitigasi dan kompensasi.

YKAN perlu memperluas pengintegrasian perencanaan konservasi dengan pembangunan melalui pendekatan DbD di Kalimantan Timur ke perusahaan lain di sektor perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya juga masih diperlukan peningkatan pemahaman ANKT dan bagaimana mengelola serta memantau area itu dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Kegiatan mitigasi dan kompensasi dapat mendorong perusahaan dan para pekebun kelapa sawit untuk bertanggung jawab dalam memenuhi standar kegiatan operasional perkebunan yang sudah disepakati. Dengan demikian, upaya mereka untuk mendapatkan atau mempertahankan sertifikasi perkebunan menjadi sarana menunjukkan komitmen untuk pengelolaan lingkungan dan perkebunan yang berkelanjutan.

MITIGASI DAN KOMPENSASI

Dalam mewujudkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, prosedur mitigasi dan kompensasi perlu diterapkan. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mencegah atau menanggulangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi atau telah terjadi akibat suatu rencana kegiatan dan usaha.

Terkait mitigasi di Kalimantan Timur, Yayasan Konservasi Alam Nusantara mengintegrasikan perencanaan untuk pembangunan hijau dengan rencana pembangunan melalui pendekatan *Development by Design* (DbD) untuk memperbaiki proses pengambilan kebijakan penggunaan lahan dari berbagai kepentingan. Metode ini menggabungkan perencanaan tingkat lanskap dengan hierarki mitigasi – *avoid*, *minimize*, *restore*, dan *offset* – untuk mendukung perencanaan penggunaan lahan yang baik.

YKAN juga bekerja sama dengan Universitas Mulawarman melakukan studi selama hampir setahun

untuk menyusun lampiran peta NKT Kalimantan Timur dengan pendekatan DbD. Kegiatan tersebut meliputi studi literatur, analisis spasial, dan pengumpulan data lapangan untuk verifikasi. NKT merupakan nilai biologis, ekologis, sosial, dan budaya dengan signifikansi luar biasa atau teramat penting. Keenam kategori NKT terdiri atas: NKT (1) Keragaman spesies; NKT (2) Ekosistem tingkat lanskap dan mozaik; NKT (3) Ekosistem dan habitat; NKT (4) Jasa ekosistem kritis; NKT (5) Kebutuhan masyarakat; dan NKT (6) Nilai kultural.

Kategori NKT telah diterapkan dalam praktik produksi berbasis lahan seperti kehutanan dan pertanian. Konsep NKT pertama kali dikembangkan sebagai komponen dari proses sertifikasi, bukan alat konservasi. Skema sertifikasi melibatkan sejumlah hal penting, seperti kepatuhan pada kebijakan dan regulasi yang berlaku, melindungi spesies terancam punah, menghargai hak kepemilikan masyarakat adat, dan mekanisme untuk memeriksa rencana pengelolaan efektif. NKT juga digunakan untuk

menginformasikan perencanaan tata guna lahan, advokasi konservasi, dan merancang pembelian produk secara bertanggung jawab dan kebijakan investasi.

Pendekatan ini membantu pengambil kebijakan dalam mencegah dan memitigasi konflik antara dampak pembangunan dengan prioritas konservasi, serta memandu kegiatan konservasi yang memberi kompensasi (*offset*). Secara keseluruhan, kajian ini berhasil mengidentifikasi 4,5 juta hektare lahan di Kalimantan Timur sebagai wilayah *avoid* (yang perlu dihindari) untuk memastikan pembangunan hijau.

Program mitigasi yang melibatkan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) Kabupaten Berau di 17 konsesi perkebunan sawit dimulai dengan mengumpulkan data sekunder lokasi ANKT dari konsesi-konsesi tersebut. Kemudian, potensi kawasan ANKT dihitung lewat kajian analisis spasial sesuai kriteria ANKT maupun panduan kawasan lindung lokal sesuai regulasi nasional.

YKAN juga menggelar pelatihan pada November 2019 bagi Dinas Perkebunan di Berau dan kabupaten lain di Kalimantan Timur untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai ANKT. Sebelum kegiatan lapangan dimulai, Dinas Perkebunan Berau juga membentuk Tim *Ad hoc* Inventarisasi dan Verifikasi ANKT.

Tim *Ad hoc* yang memverifikasi 54 titik di 17 konsesi perkebunan kelapa sawit Kabupaten Berau mendapati sebagian area di antara lokasi-lokasi itu telah dijadikan kawasan ANKT. Walau ada sebagian area belum teridentifikasi sebagai ANKT, namun telah disisihkan menjadi kawasan konservasi.

Secara umum, lokasi konservasi di dalam izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan masih memenuhi kriteria ANKT. Mereka berfungsi menjaga keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan sosial budaya. Dalam kunjungan lapangan itu juga didapati sempadan sungai, perbukitan, kawasan mangrove, waduk sumber air masyarakat, serta makam tua milik tokoh dan masyarakat setempat.

Mendukung perlindungan, pengelolaan, dan pengawasan ANKT, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau yang juga Ketua FKPB Kabupaten Berau, Muhammad Gazali, membentuk Tim Jejaring ANKT pada 2021. Berada di bawah FKPB, tim itu menjadi wadah komunikasi dan membangun kerja sama dalam melindungi, mengelola, dan mengawasi ANKT di Kabupaten Berau.

Pembentukan Tim Jejaring ANKT juga menjadi kelanjutan kegiatan YKAN sejak 2001 dalam mendukung perlindungan nilai keanekaragaman hayati ke model pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Usaha yang dimulai di Kabupaten Berau tersebut berfokus pada konservasi keanekaragaman hayati.

AREA KONSERVASI DI KEBUN SAWIT

Dalam tempo tiga tahun sejak 2019, Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Kabupaten Berau menginventarisasi Area Bernilai Konservasi Tinggi (ANKT) di 17 konsesi perkebunan kelapa sawit. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan referensi data spasial ANKT di wilayah konsesi serta mencari cara pengelolaannya bersama para pemegang konsesi, pemerintah, dan masyarakat di Kabupaten Berau.

Hasil *desk study* menunjukkan luas ANKT mencapai 37.953,07 hektare. Angka potensi ANKT ini diperoleh berdasarkan pedoman ANKT yang seharusnya diadopsi oleh perusahaan, misalnya *buffer area* atau sempadan sungai, lereng curam, medan berat, *buffer* hutan lindung, lahan basah, serta habitat fauna dan flora terancam atau langka.

Dinas Perkebunan Kabupaten Berau juga menggelar pelatihan mengenai cara memverifikasi, memantau, dan mengevaluasi kawasan ANKT. Dinas juga membentuk Tim *Ad hoc* Inventarisasi dan Verifikasi ANKT di Kabupaten Berau. Tim *Ad hoc* yang mengunjungi 54 titik sampel di 17 konsesi itu mendapati luas ANKT mencapai 4.314,6 hektare.

Hasil inventarisasi menjadi data dasar untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi kawasan ANKT di Kabupaten Berau. Kawasan yang berpotensi sebagai ANKT di dalam konsesi perlu dikelola sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan. Terutama untuk melindungi kualitas dan jasa ekosistem ketersediaan air serta menghindari bencana ekologi seperti banjir dan longsor di dalam konsesi.

Kegiatan inventarisasi ANKT ini merupakan bagian dari program mitigasi dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk di sektor perkebunan kelapa sawit. Program mitigasi dan kompensasi di perkebunan kelapa sawit juga menjadi fokus kegiatan YKAN. Menjalani kerja sama dengan pemerintah, YKAN membantu membuat solusi untuk konservasi dengan skala yang tepat dan cara yang bertahan lama.



HASIL PROGRAM MITIGASI

- 17 Konsesi
- 11 perusahaan memiliki rencana kerja pengelolaan ANKT di dalam konsesi:
 - » PT Yudha Wahana Abadi
 - » PT Global Primatama Mandiri
 - » PT General Aura Semari
 - » PT Hutan Hijau Mas
 - » PT Mulia Inti Perkasa
 - » PT Sanggam Harapan Sejahtera
 - » PT Sentosa Kalimantan Jaya
 - » PT Dwiwira Lestari Jaya
 - » PT Tunas Alam Nusantara
 - » PT Jabontara Eka Karsa
 - » PT Anugerah Agung Prima Abadi
- 2 perusahaan memiliki agenda pemantauan* satwa berkala di area konservasi
 - » PT Yudha Wahana Abadi
 - » PT General Aura Semari

*menggunakan *drone*, kamera jebak, menara pantau

Selain mitigasi, YKAN juga mendorong program kompensasi untuk mendapatkan kawasan ANKT dalam perkebunan kelapa sawit. Kompensasi merupakan segala bentuk imbalan atau jasa yang diberikan kepada lingkungan atau masyarakat yang terdampak. Kegiatan kompensasi yang ditawarkan YKAN merupakan skema yang disusun oleh *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk mematuhi Kriteria 7.3, yaitu persyaratan bahwa penanaman baru sejak November 2005 tidak menggantikan kawasan hutan primer atau kawasan lain yang dibutuhkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih NKT.

Dalam mendukung perusahaan-perusahaan anggota RSPO melakukan kegiatan kompensasi, YKAN mengembangkan instrumen bernama *Compensation Support Facility* (CSF). Instrumen berbasis web data spasial ini adalah gabungan dari instrumen DbD (*Development by Design*). Ini dikembangkan YKAN untuk membantu perusahaan yang belum memenuhi kajian ANKT sebelum Kriteria 7.3 diberlakukan pada 2005 untuk menghitung "liabilities" (kewajibannya) sesuai aturan serta katalog kompensasi yang berisi data-data kegiatan konservasi di provinsi Kalimantan Timur beserta dengan kelembagaannya. Dengan demikian, perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat mengkalkulasi berapa kompensasi yang mereka harus keluarkan serta bentuk-bentuk kegiatan atau konservasi seperti apa yang akan mereka pilih apabila mereka akan membayarkan kompensasinya dalam bentuk penyaluran dana untuk kegiatan atau program konservasi terkait.

Lebih lanjut, setelah 2005, kompensasi menjadi kewajiban perusahaan pemegang konsesi yang membuka lahan perkebunan kelapa sawit tanpa melakukan kajian nilai konservasi tinggi (NKT) lebih dulu terhadap wilayahnya. Hal ini terlepas dari apakah pembukaan lahan dilakukan sebelum atau sesudah lahan itu diakuisisi atau disewakan. Kompensasi bisa berbentuk dana proyek atau kegiatan konservasi.

Dalam Katalog Kompensasi ada data tentang Perhutanan Sosial (PS), Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Data dan informasi di dalamnya akan sangat membantu perusahaan-perusahaan, khususnya yang menjadi anggota RSPO, untuk menentukan desain proyek konservasi yang akan mereka jalankan sebagai bagian dari program kompensasi yang mereka ajukan.

Pada 2020, YKAN membantu perusahaan Tsani Hutani Abadi beserta tiga anak usahanya menghitung kewajibannya untuk kompensasi dalam periode 2016-2019 di Kutai Barat, Kalimantan Timur. YKAN memberikan rekomendasi dan masukan teknis dengan memakai instrumen DbD untuk menilai kawasan ANKT dan stok karbon tinggi serta membuat perencanaan pemulihan lahan. Perusahaan tersebut tercatat memiliki kewajiban untuk kompensasi seluas 6,485.82 hektare.

